

KANTOR KOMUNIKASI UNIVERSITAS INDONESIA
KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia - Narasumber
TEMA : Menagih Janji Penyelamatan Hutan
SURAT KABAR/MAJALAH : Jurnal Nasional

Hari **Kamis** Tanggal **14** Bulan **Februari** Tahun **2013** Halaman **6** Kolom **3-7**

RINGKASAN :

Menurut Pengamat Ekonom Lingkungan UI Joko Tri Haryanto kebijakan pemerintah di sektor kehutanan sepertinya belum mampu memberikan dis-insentif kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepedulian dengan nasib hutan Indonesia untuk terus mengeksploitasinya.

CATATAN :

g

Menagih Janji Penyelamatan Hutan

HAMPPIR setahun lalu, tepatnya Juni 2012 di Kota Rio de Janeiro diadakan pertemuan KTT Rio+20. Pertemuan tersebut menjadi bermakna, mengingat 20 tahun lalu di tempat yang sama diadakan KTT Bumi tahun 1992 yang menjadi salah satu tonggak penting kesepakatan negara-negara di dunia terkait isu perubahan iklim dan berbagai masalah lingkungan lainnya. KTT Rio 2012 ini menjadi lebih spesial karena pada waktu bersamaan diadakan pertemuan kelompok G20 yang merepresentasikan kelompok negara-negara maju dan menguasai ekonomi dunia.

Selain menghasilkan dokumen *The Future We Want*, Menteri Lingkungan Hidup Brasil sebagai tuan rumah mengklaim KTT Rio+20 sukses "meraih kegosiasti lingkungan internasional. Namun, banyak pihak justru menilai KTT Rio+20 hanya mengulang sejarah pertemuan sebelumnya: antuklimaks tanpa hasil yang konkret. Dokumen *The Future We Want* yang dianggap sebagai keberhasilan pun tidak lepas dari kritik.

Tidak adanya horizon waktu yang tegas dalam pengaturan pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) sebagai pengganti *Millennium Development Goal's* (MDG's) di semua negara, mengisyaratkan adanya tarik-ulur kepentingan Utara-Selatan yang tak kunjung reda. Negara Utara yang identik sebagai negara maju tetap mempertahankan hegemoni kemajuan teknologi untuk memperlakukan negara Selatan atas isu pemanasan bumi. Begitu pula sebaliknya: negara Selatan.

Tidak adanya mekanisme transfer dana dari negara-negara maju juga ditengarai menjadi bentuk ketidakseriusan atas dokumen tersebut. Berdalih krisis yang melanda zona Eropa, negara-negara maju tampak enggan memberikan bantuan dana kepada negara Selatan dalam kaitan implementasi teknologi ramah lingkungan.

Padaahal, tanpa bantuan finansial tersebut, berbagai bentuk teknologi pangan yang ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, serta akses air bersih mustahil dapat dicapai oleh negara berkembang. Artinya, tanpa bantuan negara maju, mustahil negara berkembang mampu mencapai tujuan SDG's tersebut.

Terlepas dari semua kritik terhadap dokumen tersebut, delegasi Indonesia justru menuliskan banyak pujian. Indonesia bahkan sempat mencuri perhatian banyak kalangan lewat pidato Presiden SBY: *Bergerak Menuju Keberlanjutan*. Dalam pidatonya, Presiden menyerukan pentingnya perubahan arah ekonomi serakah (*greedy economy*) menuju arah ekonomi hijau (*green economy*). Pidato tersebut direspons positif sebagai bentuk implementasi Indonesia ketika negara-negara lain masih sibuk mengartikulasikan aspirasi dan ambisi tentang ekonomi yang lebih bertanggung jawab.

Realisasi Janji

Berdasar laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Indonesia menduduki peringkat ke-14 di atas Prancis dan di bawah Iran dengan sumbuangan emisi 378 juta

metrik ton gas. Amerika Serikat hingga kini masih tercatat sebagai negara penyumbang terbesar CO2 di dunia, sebesar 6 miliar metrik-ton gas, disusul China dengan sumbuangan CO2 5 miliar metrik ton gas, Rusia 1,5 miliar metrik ton gas, India 1,3 miliar metrik ton gas dan Jepang 1,2 miliar metrik ton gas. CO2 adalah salah satu unsur penyumbang terjadinya pemanasan global, yang ditandai dengan meningkatnya suhu 0,2 derajat Celsius dalam rentang 2000-2007.



Joko Tri Haryanto

Ekonomi Lingkungan, UI

Peningkatan suhu tersebut menyebabkan jumlah dataran es di kutub utara pada musim semi berkurang secara signifikan, permukaan air laut meningkat 10-15 cm dalam satu abad terakhir, serta memicu terjadinya berbagai bencana alam, baik kekeringan, angin topan, gelombang panas dan banjir di berbagai belahan dunia.

Munculnya berbagai penyakit yang sudah punah serta pe-

nyakit baru seperti SARS, flu burung dan malaria, juga dinilai sebagai dampak pemanasan global. Jika kondisi ini terus dipertahankan, maka tahun 2050 kerangka suhu diprediksi mencapai 3 persen serta hilangnya lapisan es di kutub, tenggelamnya 2/3 gugusan pulau di Samudra Pasifik termasuk pulau-pulau kecil dan pesisir yang menjadi wilayah Indonesia.

Selain menjadi paru-paru dunia, hutan juga berfungsi sebagai penyediaan sumber air dan bahan makanan bagi manusia. Selain itu hutan juga memberikan habitat bagi ribuan spesies hewan dan rumah bagi puluhan jenis tumbuhan. Hutan Indonesia sejak lama dikenal memiliki keanekaragaman hayati terbesar, sehingga disebut negara Zamrud Khatulistiwa.

Karena disinari matahari hampir 365 hari dalam setahun, 11 persen jenis tumbuhan di seluruh dunia ada dan tumbuh di hutan Indonesia. Dari seluruh mamalia yang ada di dunia, 10 persen hidup di hutan Indonesia. Hutan Indonesia juga menjadi habitat 16 persen burung di dunia. Dalam penyusunan konsep Rencana Aksi Nasional/Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK), sektor kehutanan dan lahan gambut menyumbang 48 persen pemanasan global.

Akibat belum adanya pembaruan kebijakan sektor kehutanan, laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia terus berjalan. Rencana alih fungsi hutan kawasan Puncak, sejatinya hanyalah sebagian kecil dari berbagai perselingkuan ekologi lainnya yang tidak terlacak. Kebijakan pemerintah di sektor

kehutanan seperti halnya yang mampu memberikan *dis-incentif* kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepedulian dengan nasib hutan Indonesia untuk terus mengeksploitasinya.

Menurut WWF, tahun 1960-an luas hutan Indonesia masih 82 persen dari seluruh wilayah negara. Sekitar tahun 1982-an, luas hutan Indonesia menyusut tinggal 68 persen tahun 1995, menyusut lagi menjadi 53 persen dan kini luas hutan diduga tinggal 49 persen.

Moratorium penebangan hutan memang sudah diumumkan. Pemerintah melalui UKP4 pun sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) REDD+ yang langsung bertanggung jawab pada Presiden. Sayangnya, berbagai langkah tersebut justru menggambarkan adanya kebingungan dan kurangnya koordinasi di tubuh pemerintah terkait langkah penyelamatan hutan.

Jika sudah ada Kementerian Kehutanan, mengapa pemerintah harus membentuk Satgas REDD+? Bagaimana pula pembagian kewenangan dengan institusi lain yang sudah terlebih dahulu dibentuk seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)?

Berbagai pertanyaan tersebut perlu dijawab segera oleh pemerintah. Begitu pula dengan langkah nyata penyelamatan hutan demi memperbaiki karut-marut pengelolaan hutan yang tak pernah kunjung usai. Namun apa boleh buat, ruwetnya birokrasi, banyaknya kepentingan dan kegaduhan politik tampaknya masih menghambat ruang gerak pemerintah dalam penyelamatan hutan di Indonesia. ■